



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 26 Maret 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIT KERJA : UNIVERSITAS NUSA CENDANA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : PHILIPHI DE ROZARI
2. Jabatan : KETUA PRODI S2 ILMU LINGKUNGAN
3. NHK : 861991

II. DATA HARTA

- | | | |
|--|------------|----------------------|
| A. TANAH DAN BANGUNAN | Rp. | 1.212.000.000 |
| 1. Tanah dan Bangunan Seluas 410 m2/110 m2 di KAB / KOTA KOTA KUPANG , HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000 | | |
| 2. Tanah dan Bangunan Seluas 410 m2/100 m2 di KAB / KOTA KOTA KUPANG , Rp. 400.000.000 | | |
| 3. Tanah Seluas 693 m2 di KAB / KOTA KUPANG, HASIL SENDIRI Rp. 50.000.000 | | |
| 4. Tanah Seluas 216 m2 di KAB / KOTA KUPANG, HASIL SENDIRI Rp. 25.000.000 | | |
| 5. Tanah dan Bangunan Seluas 197 m2/36 m2 di KAB / KOTA KUPANG, HASIL SENDIRI Rp. 198.000.000 | | |
| 6. Tanah Seluas 960 m2 di KAB / KOTA KUPANG, HASIL SENDIRI Rp. 64.000.000 | | |
| 7. Tanah Seluas 489 m2 di KAB / KOTA KUPANG, HASIL SENDIRI Rp. 75.000.000 | | |
| B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN | Rp. | 330.000.000 |
| 1. MOBIL, TOYOTA KIJANG INNOVA/ MINIBUS Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 330.000.000 | | |
| C. HARTA BERGERAK LAINNYA | Rp. | 45.000.000 |
| D. SURAT BERHARGA | Rp. | ---- |
| E. KAS DAN SETARA KAS | Rp. | 663.024.733 |



F. HARTA LAINNYA

Sub Total

Rp. ----
Rp. 2.250.024.733

III. HUTANG

Rp. 77.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 2.173.024.733

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.